Wirausaha
Volume 7, No. 1, Agustus 2012, hal. 339 - 346
ISSN 1693 - 234X

Analisis Stake holders Approach Suatu Model Membangun Peradaban Kota Bandung

Teddy Hikmat Fauzi

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan Bandung
Kampus : Jl. Lengkong Besar 68 Bandung

ABSTRACT

Bandung city issues as acentre of government, education, economy, services, cultural development, both natural attractions, culinary and fashion impact on the incidence of many problems such as congestion, environmental degradation, transportation, and more dense wake region. Also its lack of green open land, water system disorders, less land conservation, and pollution. Bandung urban development also raises social and environmental issues.

Solutions for structuring a healthy environment by controlling the construction area of North Bandung. Arrange of street vendor in ordernHumane, encouraging the relocation and expansion of the construction of traditional into healthy markets. Elementary and Secondary Education for free, for in College Scholarships to be copied can be obtained from the Corporate Social Responsibility (CSR), Public Improvement Revenue Index (HDI), Improved free health care to poor families (GAKIN). Businessactors as stskeholders in the development community should work with the container of the entrepreneur as SME_S. In order to astablish continuity of the production line and distribution at the district level, expected development policy and strategic direction to the dictrict level. Because, districts are actively dealing with the public directly.

Keywords : *stoke holders Bandung city development*

PENDAHULUAN

Wacana Pembentukan pemerintahan baru di era berakhirnya kepemimpinan walikota Bandung tahun 2014 , harus diwujudkan dengan semangat membangun pemerintahan baru yang merekontruksi alih kekuasaan pada perubahan paradigma berpikir penguasa secara konsentratif bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat kota Bandung dalam bingkai amanah demokrasi. Dengan demikian kebutuhan sosok pemimpin masa depan lebih ideal memiliki komitmen pada visi pembangunan kota yang berbudaya etika dalam konteks penyerahan estafet kepemimpinan yang menjadikan pemimpin yang baru sebagai sosok pembawa amanah dan BUKAN lagi dari sekedar korban malpraktek *euphoria* kemenangan yang hanya mewariskan dinasti kekuasaan semata.

Konsep membangun kota Bandung tidak terlepas dari ide dan gagasan pembangunan wilayah perkotaan pada umumnya bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang sistematis, evaluatif dan historis ke arah kondisi yang lebih baik. Menurut **Todaro** dalam *the three objectives of development, dikatakan bahwa* pembangunan ditujukan untuk pemenuhan peningkatan standar hidup (*levels of living*) atas setiap orang baik dari segi pendapatan per kapita, peningkatan konsumsi pangan, sandang dan papan termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan yang kesemuanya dapat tercapai karena jangkauan daya beli masyarakat yang dengan demikian akan menumbuhkan rasa percaya diri (*self esteem*) atas setiap orang dan secara politis akan mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis.

Pembangunan memerlukan dukungan semua pihak termasuk *stakeholders* pembangunan yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung atas keberlangsungan pembangunan yang *suistanable* bagi kota Bandung yang merasa berkewajiban dan peduli terhadap pembangunan kota di masa yang akan datang secara efisien dan produtif. Wacana pembangunan dalam konteks pembangunan yang multidimensional dan saling interdependensi tersebut meliputi aspek *environment*, *value* dan *resources* **Thompson** (1999) yang senantiasa berupaya ke arah perubahan dan perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*) bertahap dan berkelanjutan serta menyiratkan adanya makna pembaruan, berkesinambungan, reorganisasi, modifikasi dan inovasi dari struktur kelembagaan **Gunawan Sumodiningrat** (2005 : 87).

Selanjutnya Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional menyatakan, perencanaan dalam konteks pengertian "membangun" adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan kota Bandung merupakan akumulasi tekanan politik (*pressure politics*) dan pemaksaan kehendak atas program-program kerja yang bersifat populis yang kurang memperhatikan lingkungan infrastruktur politik, struktur nilai serta kesiapan sumber daya yang mendukungnya sehingga dapat berpengaruh pada kurang tercapainya sasaran program yang ditawarkan kepada masyarakat yang mengakumulasi pada keberpihakan pada kelompok dan komunitas tertentu sehingga terjadi marjinalisasi pembangunan dan kontra produktif.

Terjadinya marjinalisasi pembangunan merupakan stigma terjadinya penyimpangan aspirasi masyarakat yang cenderung mengedepankan kepentingan politik. Secara empiris menunjukkan program kerja pemerintah kota Bandung belum mencerminkan harapan masyarakat pada umumnya dan terjebak pada keberpihakan pada kelompok kepentingan tertentu (*interest group*) sehingga setiap pengambilan keputusan dan arah kebijakan pembangunan hanya sebatas pada transaksi politik semata dan bukan mencerminkan pada proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pilihan rakyat (*public choice*).

Kota Bandung dihadapkan kepada berbagai persoalan klasik pada umumnya yang berkaitan dengan upaya menciptakan kota ideal (*ideal city*) sebagaimana yang diungkapkan oleh **Dr. Ing Jo Santoso** bahwa Masalah pokok pertama dan juga yang paling utama yang harus dihadapi oleh setiap kota adalah urbanisasi yang memiliki karakteristik pada kecepatan perubahan dan dimensi yang sangat sulit untuk diatasi, yang pertama adalah kecepatannya dan yang kedua adalah dimensional dikatakan bahwa penduduk daerah urban Indonesia akan menjadi dua kali lipat.

Begitupula jumlah masyarakat dunia di perkotaan telah melampaui batas magis 50% dari penduduk dunia sehingga masalah utama adalah masalah keseimbangan atas distribusi dan penggunaan tanah perumahan dan dan fasilitas sosial yang dibutuhkan masyarakat yang mendorong ekspansi proses komersialisasi lahan dan menyebabkan menurunnya jumlah unit hunian rumah di pusat kota dan mendorong terjadinya *urban sprawl* dalam bentuk hunian suburban dan desintegrasi fungsi kota serta tekanan struktur kekuasaan ekonomi dan politik global yang

memberikan peluang terbukanya hubungan lintas regional, nasional dan global (*borderless world*) dan semangat ASEAN Community (2015).

Kompleksitas permasalahan tersebut membawa perubahan struktur ekonomi dan sistem nilai kultural sehingga tidak mengherankan kota Bandung menjadi *bridgeheads* bagi ekonomi global dan menjadi agen-agen pemasaran dan mediasi demi kepentingan ekonomi global yang mengakumulasi permasalahan yang dihadapi kota Bandung, yakni beralihnya fungsi kota menjadi titik sentral perdagangan, jasa dan pariwisata yang mendorong transformasi perubahan sistem nilai masyarakat kota Bandung dari masyarakat tradisional menjadi modern, *rural* menjadi *industrial* sebagai perspektif ikon kota masa depan sebagai *agent of development* yang menjadikan lokomotif mendorong perkembangan perkotaan di Indonesia dalam suatu kesatuan urban (*urban entity*) agar mampu berkompetisi dengan kota lainnya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah antisipasi atas perubahan sistem ekologis global maupun lokal yang harus memiliki kemampuan untuk mengatasi atau menjinakkan berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh kenaikan suhu bumi seperti perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, kekeringan dan banjir.Analisis praktis permasalahan yang dihadapi Kota Bandung menurut Wakil Gubernur Jawa Barat pada kesempatan memperingati hari jadi Kota Bandung yang ke 200 tahun, " bahwa sebagai ibukota provinsi Bandung sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, ekonomi, jasa dan pengembangan budaya daerah dan wisata memiliki permasalahan seperti kependudukan, degradasi lingkungan, kemacetan lalu lintas, sarana transportasi publik, semakin padatnya kawasan-kawasan terbangun, masih kurangnya lahan terbuka hijau, gangguan tata air, berkurangnya lahan konservasi, polusi sungai, polusi udara ". Sejalan dengan pernyataan tersebut, **Taufikurahman,** pakar transportasi ITB dikatakan bahwa "masalah transportasi di kota Bandung tampaknya semakin parah dan jumlah kendaraan semakin bertambah, sementara lebar jalan tidak mampu mengatasi pertambahan jumlah kendaraan yang demikian cepat " Kemacetan juga terjadi sebagai dampak beralih fungsinya kawasan perumahan menjadi lahan bisnis, meluasnya pembangunan mall dan hotel, menjamurnya PKL serta tumbuh berkembangnya pasar tumpah di berbagai sudut kota Bandung.

Hal senada dungkapkan pula oleh **Dadang Sudardja** sebagaimana dirilis di Berpolitik.com " dibalik semua aktifitas pembangunan kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup, akselerasi kerusakan lingkungan di kota Bandung tidak dapat dibendung lagi dan semuanya itu merupakan dampak dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang tidak terkendali sebagai faktor penyebab rusaknya lingkungan hidup, yakni beralihnya fungsi lahan dan peruntukan yang mengakumulasi melahirkan persoalan baru yakni berkurangnya resapan air, sebagaimana hasil berbagai penelitian, diperkirakan warga masyarakat Bandung pada tahun 2020 akan mengalami kesulitan air tanah karena pengambilan air tanah yang melebihi kapasitas debit, terutama didaerah yang dijadikan kawasan industri serta rusaknya hutan dan lahan yang ada di kawasan Bandung Utara ". Menurut BPLH kota Bandung sendiri dikatakan bahwa Bandung mengalami persoalan serius yang berkaitan dengan rusaknya lingkungan hidup sebagai isu pokok regional lingkungan kota Bandung yakni :

1. **Masalah air.** Permasalahan air yang terjadi disebabkan karena kerusakan lingkungan di wilayah *Bandung Utara* seperti kerusakan hutan sebagai wilayah tangkapan air, berubahnya fungsi lahan konservasi menjadi peruntukan lain yang tidak mendukung fungsi konservasi. Akibat yang ditimbulkan adalah : *Pertama* Masalah kelangkaan air baku, *kedua* Menurunnya permukaan air tanah, *ketiga* Menurunnya kualitas air tanah, *keempat*, Banjir, dan *kelima* Erosi dan sedimentasi.
2. **Penataan ruang.** Konsep dekonsentrasi planologis dengan terciptanya kota-kota kecil disekitar kota Bandung dengan fungsi tertentu dan diarahkan sebagai *Counter Magnet* tidaklah mudah, bahkan cenderung semakin menyatu. Tidak jelasnya struktur perkotaan

berakibat dengan semakin beratnya kota Bandung sebagai inti untuk menanggung aktivitas penduduk.

3. **Transportasi.** Pertambahan penduduk dan infrastruktur perkonomian yang semakin terus meningkat menyebabkan pergerakan lalu lintas semakin membesar. Kondisi ini tidak diantisipasi dengan prasarana yang ada terutama jaringan jalan. Indikasi seriusnya masalah ini adalah : a. Kapasitas jalan menurun (perbandingan panjang jalan dan jumlah kendaraan sudah tidak proposional). b. Pelayanan angkutan umum belum memadai, seharusnya angkutan umum terpadu sudah berjalan, serta lebih banyak menggunakan bus c. Pengaturan lalu lintas yang tidak berjalan dengan baik d. Sarana parkir yang kurang, dan trotoar yang menjadi tempat PKL.
4. **Penduduk.** Permasalahan utama dari segi kualitas dan kuantitas akan langsung menyangkut pada perkembangan kota yang diindikasi dengan : a. Meluasnya kawasan perkotaan yang mengarah pada koridor Barat-Timur. b. Meluasnya kawasan perkotaan yang mengancam daerah konservasi Utara-Selatan. c.Berkembangnya kawasan perkotaan di kota-kota tertentu seperti Cimahi, Batu Jajar, Cicalengka, Cikeruh, Cimanggung dll. d. Meningkatnya pertumbuhan dan konsentrasi penduduk di bagian timur Bandung dan sebaliknya terjadi penurunan di kota lama. e. Meningkatnya kepadatan penduduk di perbatasan kota inti dan pinggiran.Dengan bertambahnya penduduk dan kegiatan kota lainnya menimbulkan masalah perkotaan dan sudah menjadi masalah regional seperti : Pengelolaan Limbah padat, Udara, serta Penduduk Komuter. (Sumber : BPLH Kota Bandung)
5. **Masalah udara.** Laju tingkat kendaraan bermotor yang semakin tahun terus mengalami kenaikan, dan buruknya manajemen transportasi, serta masih diberlakukannya bensin bertimbal ditambah kondisi tofografi Bandung yang cekungan, menjadikan udara di Bandung semakin buruk. Masalah udara perlu penanganan serius. Transportasi udara yang terhambat di utara dan selatan oleh gunung-gunung mengakibatkan akumulasi polutan.

Masalah penduduk yang menyebabkan meluasnya kota membawa konsekuensi kepada kondisi udara. Pencemaran udara sudah harus memperoleh perhatian bukan hanya kota Bandung sebagai kontributor terbesar, tetapi kota-kota penyangga yang juga akan menjadi kontributor dan penerima beban pencemaran. Sektor transportasi yang merupakan kontributor utama perlu memperoleh perhatian lebih ini terkait dengan penduduk di Metro Bandung.

Selanjutnya berdasarkan Dari hasil penelitian berbagai sumber (BPLH kota Bandung, Laboratorium Teknik Lingkungan ITB) menunjukan kondisi kualitas udara dari tahun ketahun semakin memburuk. **Dr. Puji Lestari** dari Depatemen Teknik Lingkungan ITB, mengatakan sejak tahun 1999 di sejumlah kawasan keramaian, partikel polutannya di udara sudah melampaui baku mutu minimum. Kekhawatiran ini semakin beralasan ketika **Puji Lestari** melakukan pengujian dengan mengambil darah dari sejumlah anak-anak sekolah dasar (SD) dan SLTP, pedagang kaki lima, polisi, dan tukang parkir. Hasilnya di luar dugaan siapapun. Dari 10 sampel darah anak SD di Kebon Kelapa, ditemukan delapan sampel yang kadar timbalnya jauh melebihi mutu, yaitu 10 mikrogram per desiliter.

Hal tersebut diakibatkan karena manajemen transportasi yang buruk memberikan kontribusi terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bensin bertimbal oleh kendaraan, minimnya Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi untuk mereduksi udara. Bandung yang memiliki luas wilayah 16.777.99 ha, dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 3 juta jiwa pada siang hari, dibutuhkan ruang terbuka hijau 30% dari luas wilayah, dengan jumlah tegakan pohon 1.500.000 pohon. Saat ini hanya ada 1.6% dengan jumlah tegakan pohon kurang dari satu juta. (Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2004 Tentang RTRW Kota Bandung, RTH 10 % dari luas wilayah). Menurut **Mubiar**, Ketua Dewan Pakar DPKLTS, oksigen di Bandung pun sudah berkurang bagi penduduknya karena kota ini kekurangan 650.000 pohon. Saat ini kota Bandung

berpenduduk 2,7 juta jiwa. Persoalan lain yang dihadapi kota Bandung adalah meningkatnya volume sampah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan gaya hidup, berdasarkan hasil penelitian **Wahyu Surakusumah**, bahwa kota Bandung setiap harinya menghasilkan sampah sebanyak 8.418 m3 dan hanya bisa terlayani sekitar 65% dan sisa tidak dapat diolah. Sebagian besar sampah yang dihasilkan di Bandung merupakan sampah basah yang mencakup 60-75% dari total volume sampah yang berasal dari beberapa sektor, yakni pemukiman, daerah komersil, industri dan perkantoran-perkantoran yang dapat memberikan dampak terganggunya eksosistem dari rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari lingkungan dan mendorong menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Disamping masalah tersebut di atas, masalah krusial lainnya adalah belum tercapainya peningkatan indeks prestasi manusia (IPM) yang menjadikan ukuran keberhasilan peningkatakan kesejahteraan masyarakat bahwa sejak tahun 2003 sampai 2007 kenaikan IPM hanya mencapai 0,94 persen atau hanya sebanyak 77,15 persen dan pada 2007 IPM hanya naik menjadi 78,09 persen. Posisi IPM Kota Bandung secara secara nasional berada pada peringkat 40 besar. Menurut **Tedy Rusmawan** wakil ketua pansus LKPJ, menunjukkan keprihatinannya " bahwa telah terjadi stagnasi pembangunan di kota Bandung, hal ini tidak relevan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung yang belum mampu mendongkrak peningkatan IPM.

Sebagaimana diketahui bahwa indikator kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat kota Bandung sudah seharusnya sebagai kota besar, IPM nya harus sudah bisa menyaingi kota besar lainnya yang berada di urutan teratas diantara kota besar lain di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Palembang. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa daerah di Jabar seperti Depok dan Bogor, menurutnya, IPM Kota Bandung pun masih kalah bersaing. Selanjutnya menurut Sekretaris Komisi C DPRD kota Bandung, **Muchsin Al Fikri**, dikatakan bahwa meningkatkan IPM di Kota Bandung menjadi satu tantangan yang cukup berat untuk Walikota karena sebagai kota tujuan urban. Kritik yang disampaikan oleh DPRD dalam tanggapan LKPJ wali kota harus menjadi catatan, bukan hanya oleh **Dada Rosada**, tapi untuk semua calon wali kota yang akan memimpin Bandung bahwa "Semua calon wali kota, harus memiliki komitmen untuk meningkatkan IPM dan kesejahteraan masyarakat Bandung,".

Berbagai permasalahan pembangunan kota Bandung yang muncul kepermukaan dewasa ini menunjukkan kurangnya sinergitas diantara beberapa elemen *stakeholders* pembangunan yang berfungsi sebagai komponen kekuatan masyarakat diantaranya adalah pemberdayaan aparatur pemerintah, membangun dan memberdayakan masyarakat mandiri (*community empowerment*) sebagai subjek pembangunan serta pelibatan dan peran aktif para wirausaha dan akademisi. Dalam konteks manajemen strategi secara sistemik terdapat empat (4) komponen yang didefinisikan sebagai elemen lingkungan internal dan eksternal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi organisasi pemerintah yang mendasari konsep pengertian lingkungan menurut konteks manajemen strategi tidak lain adalah daya tarik pengaruh dan kekuatan lingkungan terhadap proses dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi.

Kekuatan pengaruh suatu lingkungan (dengan karakteristiknya) terhadap organisasi akan membuat perubahan dan dalam cara mana strategi organisasi diterapkan Menurut **Wheelen** dan **Hunger** (2000:8-9) membedakan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi terdiri atas lingkungan internal (*internal environment*) dan lingkungan eksternal (*external environment*), yang dimaksud lingkungan internal (*internal environmental*) adalah variabel sumber daya aparatur pemerintah yang terdiri dari faktor internal dari struktur (rantai perintah), budaya (nilai dan harapan) serta kepemilikan sumber daya (aset, keahlian, kompetensi dan pengetahuan).

Sedangkan lingkungan eksternal (*external environmental*) adalah variabel-variabel yang berada di luar organisasi pemerintah sebagai lingkungan sosial (*societal environment*) seperti Perwakilan Rakyat (DPRD), institusi Perguruan Tinggi, Masyarakat dan organisasi Professional,

Organisasi Bisnis, ORMAS dan LSM sebagai *partnership* pemerintah yang secara umum memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek sosiokultural, ekonomi, hukum, politik serta teknologi.

Menurut **Leo Agustino** (2000:37), dikatakan bahwa para politisi dan birokrasi di bawah rejim yang terpilih memainkan peranan yang sangat mirip dengan perusahaan, karena mereka menghasilkan kebijakan, peraturan dan juga *public goods*, dengan demikian seorang politisi yang dalam hal ini walikota sebagai pengemban jabatan politis haruslah seorang *entrepreneurs* secara jeli menginterprestasikan permintaan dan kebutuhan inftrastruktur politik.

Lain hal-nya menurut **Teddy** (2004:11) dikatakan bahwa sosok *entrepreneurs* tidak hanya sebatas dimiliki oleh seorang politisi saja, akan tetapi mutlak dimiliki oleh seluruh aparatur pemerintah sebagai representasi yang mendukung upaya mewirausahakan birokrasi (*reinventing government*) dengan merubah struktur dan konsep berpikir (*mindset*) layaknya yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha (*entrepreneurs*) seperti : Konsekuensi atas kinerja organisasi pemerintah strategi kepada pelanggan, menjadikan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani secara professional akuntabel dan transparan paradigma baru membangun struktur kelembagaan dengan analisis lingkungan pendekatan pemangku kepentingan (*Stakeholdes approach*) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah kota Bandung untuk melakukan perbaikan, pembernahan dan penataan ulang sebagai bentuk kajian kontinum dan tidak bersifat "*snap shot*" sehingga kegagalan dalam manajemen pemerintahan secara strategis segera dapat melakukan orientasi, restrukturisasi dan aliansi yang dapat membantu pergeseran paradigm (*paradigm shift*).

Secara strategis perencanaan pembangunan memiliki landasan operasional yang diturunkan dari premis dan asumsi dasar sebagai nilai yang dipergunakan untuk melihat kondisi hari ini dan proyeksi masa depan **Gunawan Sumodiningrat** (2005:183), karena pembangunan masa kini merupakan perpaduan antara masukan dari bawah (*bottom up*) dan dari atas (*top down*) yang harus mengacu pada urgensi kebutuhan, kompetensi dan potensi kota Bandung. Untuk memberikan gambaran tentang proses manajemen strategis di mana konsep rencana strategis (*strategic planning*) dan implementasinya (*strategic implementation*) diperlihatkan bahwa terdapat empat unsur dasar dari proses manajemen strategis yang dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungan (*environmental scanning*), kemudian menyusun formulasi strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*) dan evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*).

Ke-empat faktor ini merupakan suatu proses berkelanjutan yang dapat menjadi jalan bagi organisasi untuk mencapai visinya. Menjelaskan pengertian strategi sebagai suatu rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah kota Bandung memiliki kemampuan menganalisis urgensi masalah di dalam mencapai misi dan tujuannya guna menghasilkan keputusan politik yang diformulasikan dan diimplementasikan dalam bentuk rencana-rencana yang didesain untuk mencapai sasaran pembangunan kota Bandung.

Analisis kritis dari berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Bandung sejak 2 (dua) periode kepemimpinan walikota Bandung menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dikritisisasi sebagai rekomendasi membangun kota Bandung masa depan yang akan dituangkan dalam rencana strategis sebagai berikut, premis dan asumsi dasar bahwa pembangunan merupakan nilai yang dipergunakan untuk melihat kondisi hari ini dan proyeksi masa depan harus mencerminkan perpaduan antara masukan dari masyarakat bawah (inftrastruktur) tidak bersifat populis dan bukan atas dasar konsumsi kepentingan politik semata akan tetapi mengacu pada urgensi kebutuhan, kompetensi dan potensi masyarakat kota Bandung yang disusun secara strategis melalui proses pengamatan terhadap lingkungan (*environmental scanning*) melaluii tahapan-tahapan formulasi strategi (*strategy formulation*), implementasi strategi (*strategy implementation*) serta evaluasi dan kontrol (*evaluation and control*) secara sistemik dan simultan. Membentuk dan mendorong

perubahan sikap, prilaku, konsep berpikir (*mindset*) aparatur pemerintah kota Bandung sebagai representasi mewirausahakan birokrasi (*reinventing government*) dan mendukung pada sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada penciptaan *good governance*.

Membangun dan memberdayakan masyarakat mandiri (*community empowerment*) sebagai subjek pembangunan yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal (*external environmental*) yakni variabel-variabel yang berada di luar organisasi pemerintah sebagai lingkungan sosial (*societal environment)* seperti perwakilan rakyat (DPRD), institusi perguruan tinggi, masyarakat dan organisasi profesional, organisasi bisnis, ormas dan LSM sebagai *partnership* pemerintah yang secara umum memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek sosiokultural, ekonomi, hukum, politik serta teknologi secara sistemik dipadukan dengan ekemen-elemen lingkungan internal (*internal environment*) yang merupakan variabel sumber daya aparatur pemerintah termasuk pembentukan stuktur, budaya, nilai dan harapan serta kepemilikan sumber daya pendukung berupa aset, keahlian, kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki aparatur Pemerintah.

Orientasi pembangunan kota Bandung harus diarahkan kepada perubahan dan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan (*continous improvement*) menyiratkan adanya makna pembaruan, berkesinambungan, reorganisasi, modifikasi dan inovasi dari struktur kelembagaan dengan tetap konsisten memperhatikan aspek *environment, value dan resources*, karena kota Bandung dihadapkan kepada berbagai persoalan pelik yang berkaitan dengan upaya menciptakan kota ideal (*ideal city*).

Perspektif Bandung sebagai icon kota masa depan tidak menutup kemungkinan menjadi *benchmarking* bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia sebagai komitmen membangun kota atas dasar nurani kekuasaan dan bukan tirani kekuasaan. Ada beberapa solusi kontribusi pemikiran bagi walikota terpilih utuk lebih sensitif menyimak berbagai permasalahan kota sebagaimana yang diungkapkan di atas, seperti permasalahan polusi udara serta strategi efektif yang harus dilakukan dengan lebih mengefektifkan penataan dan pengaturan masalah transportasi dan sarana angkutan pemangku moda secara massal serta hal lainnya berkaitan dengan penataan lingkungan yang sehat adalah dengan mengendalikan pembangunan di kawasan utara kota Bandung secara evaluatif yang tidak berdampak pada rusaknya lingkungan hidup seperti berkurangnya resapan air, kelangkaan air baku, menurunnya permukaan air tanah, menurunnya kualitas air tanah, banjir, erosi serta sedimentasi lingkungan, disamping itu pula perlu ketegasan untuk mengevalusi perubahan fungsi lahan perumahan yang menjadi area komersil termasuk melakukan penataan pedagang kali lima (PKL) secara manusiawi, mendorong perluasan dan relokasi pembangunan pasar tradisional menjadi pasar sehat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya konsistensi pencapaian peningkatan IPM yang diharapkan eskalasinya akan terus meningkat selaras dengan pencapaian peningkatan PAD pemerintah kota Bandung melalui kesempatan memperoleh pendidikan gratis di tingkat dasar dan menengah bahkan sampai tingkat perguruan tinggi dengan menjalin kerjasama sinergis dan strategis dengan beberapa PTN maupun PTS untuk memberikan kesempatan bagi sebagian besar penduduk kota Bandung untuk memperoleh kesempatan belajar di tingkat perguruan tinggi dengan memanfaatkan dana CSR pendidikan sebagai bagian dari tanggungjawab sosial institusi perguruan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

Peningkatan IPM juga akan dilakukan secara linier melalui peningkatan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin (GAKIN) dengan mengoptimalkan pelayanan kesehatan, peningkatan prasarana dan sarana puskesmas di tiap-tiap kecamatan serta menjalin kerjasama dengan rumah sakit umum rujukan dengan memanfaatkan Askeskin dengan mengoptimalkan fungsi serta peranan dana CSR serta mengupayakan pengembangan fungsi dan prasarana pembangunan ekonomi rakyat secara partisipatif terbangun atas prakarsa dan tanggungjawab para pelaku bisnis sebagai

stakeholders pembangunan dalam wadah komunitas pelaku bisnis guna menjalin kerjasama pelibatan secara aktif dengan masyarakat *entrepreneur* UMKM dan Koperasi guna menjamin kontinuitas keterkaitan jalur produksi dan distribusi di tingkat kecamatan-kecamatan dengan membentuk kantung-kantung bisnis sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja, peningkatan ketrampilan, pembentukan modal bergulir serta merelokasi yang bersumber dari dana bantuan BAWAKU untuk pembentukan dana masyarakat mandiri yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi produktif rakyat.

Sebagai bagian dari upaya membangun sistem akuntabilitas publik, maka kebijakan dan arah strategi pembangunan harus didesentralisasikan ke tingkat-tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan karena masing-masing wilayah memiliki tingkat permasalahan dan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan wilayah lainnya sehingga secara aspiratif dan proaktif pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan memiliki fungsi dan tanggungjawab di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula hal nya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi alokasi penggunaan anggaran diharapkan dapat terwujud sebagai upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintah daerah sebagai antisipasi terjadinya defisit penggunaan anggaran rutin dan pembangunan atas pendapatan yang diperolehnya secara seimbang dengan mengupayakan menggali sumber dana baru yang bersumber dari dana masyarakat dengan menawarkan produk investasi keuangan berupa obligasi daerah (*municipal bonds*) secara akuntabel dan transparan dalam hal mengatur Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara adil dan proporsional seutuhnya dipergunakan bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino,Leo,2000, Ekonomi Politik , Alphabet, Bandung Farazmand, Ali (ed.), *Handbook of Bureaucracy*, New York, N.Y.:

Marcel Dekke, Inc.,1994.Fox, Charles J., *The Use of Phylosophy in Administrative Ethics* dalam Coope, Terry L.,*Handbook of Administrative Ethics*, New York, N.Y.:

Marcel Dekke, Inc, 1994.Frankena, W.K., *Ethics*, 2nd ed., Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1973.

Frederickson, H.G., *Ethics and Public Administration*, Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, Inc.,1993.

_____, *Research and Knowledge in Administrative Ethics* dalam Cooper, Terry L., *Handbook of Administrative Ethics*, New York, N.Y.: Marcel Dekker, Inc, 1994

_____ dan Hart, David K., *The Public Service and The Patriotism of Benevolence* dalam *Public Administration Review*, *45*, 1985.

Gunawan Somodiningrat, 2005,membangun Indonesia Emas, Elek Media Komputindo

Imam Cahyono,2008, Menjinakkan Metakuasa Global,Suara Indonesia untuk Globalisasi yang Lebih Adil, LP3ES, Jakarta

Sedarmayanti, 2007, *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*, Mandar Maju, Bandung.Todaro,

Michael.P dan Smith,Stephen.C, Pembangunan Ekonomi, Erlangga, Edisi ke sembilan , 2009

Teddy Hikmat Fauzi,2004,Manajemen Bisnis Global, Konsep dan Strategi Pemikiran, CEPLAS, FISIP, Universitas Pasundan.

Wheelen.Thomas L. dan David J Hunger,2000, *Strategic Management and Business Policy* , fourth Edition, Addison Wesley Publishing Company, NY